

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan berikut ini adalah berdasar akan hasil penelitian, pembahasan, dan hasil temuan di lapangan. Penelitian dilakukan pada SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung sebagai sample yang tentunya SMKN mengalami hal yang sama.

Pada SMKN kebijakan Pemerintah untuk mencabut dana SPP/DPP mengakibatkan dana pembiayaan pendidikan berkurang yang berpengaruh terhadap kegiatan Proses Belajar Mengajar, utamanya adalah berkurangnya dana untuk memenuhi kebutuhan tambahan kesejahteraan Guru dan pengadaan alat pelajaran yang dengan sendirinya, berakibat mundurnya prestasi belajar siswa. Tentunya hal ini juga akan sama dirasakan oleh SMKN yang lainnya. Karena itu penelitian terhadap biaya pendidikan di SMKN setelah ada pencabutan SPP/DPP oleh pemerintah ini sangat urgen untuk diteliti, yang tentunya akan mendorong para pengelola SMKN sebagai sekolah kejuruan yang memiliki potensi untuk dapat mengumpulkan dana pendidikan dari hasil produk atau jasa yang merupakan karakteristik khas sekolah kejuruan. Sehingga keinginan untuk menambah mutu dan jumlah produk atau jasa sekolah dari siswa akan meningkatkan kualitas memiliki nilai jual yang dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada sample SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan pencabutan dana SPP/DPP sebagai kebijakan Pemerintah, SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung kehilangan dana sebesar Rp 10.068.000,- sehingga

ada pengurangan jumlah dana dalam memenuhi tambahan kebutuhan kesejahteraan Guru dan alat pelajaran dan akan berakibat menurunnya prestasi belajar siswa.

2. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung dalam dua tahun terakhir mengalami pasang surut. Sumber-sumber yang mengalami kenaikan antara lain untuk gaji yaitu dari tahun 1999/2000 sebesar Rp 396.514.000,- menjadi pada tahun 2000/2001 sebesar Rp. 469.845.000,- uang lembur tahun 1999/2000 sebesar Rp 1.839.000,- menjadi pada tahun 2000/2001 sebesar Rp 5.701.000,-. Demikian halnya juga pemeliharaan gedung dari Rp 4.631.000,- di tahun 1999/2000 menjadi Rp 15.424.000,- di tahun 2000/2001. Sedangkan semua sektor penerimaan dari BP3 mengalami kenaikan yang signifikan yang berarti keluarga dan masyarakat menyadari benar bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan biaya yang besar. Bagi pengelola sekolah kebijakan Pemerintah untuk mencabut SPP/DPP mendorong kebijakan untuk menggunakan dana BP3 untuk kepentingan yang sarat dengan peningkatan akademik seperti diperuntukan untuk laboratorium bahasa dan laboratorium komputer.
3. Ada tiga strategi yang dilakukan SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung dalam penganggaran yaitu (1) peninjauan ulang kebutuhan-kebutuhan tahun lalu untuk diketahui kemungkinan penambahan kebutuhan di masa datang, (2) memperhatikan perubahan harga yang tentunya jumlah biaya akan disesuaikan dengan perubahan harga ini. (3) untuk gaji dan tunjangan menyesuaikan

dengan kondisi tenaga kependidikan. Strategi ini menempatkan posisi dana BP3 jadi sangat menentukan .

4. Strategi penggalian sumber dana BP3 yang dilakukan oleh SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung adalah strategi umum :

- (a) Membina keharmonisan hubungan antara sekolah dan orang tua murid melalui forum-forum rapat dan pertemuan antara sekolah dengan orang tua murid.
- (b) Mengembangkan tradisi keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan dana BP3 melalui pelaporan tahunan baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan dalam forum rapat BP3.
- (c) Mengoptimalkan peran BP3 dalam fungsi pengawasan.

Sedangkan strategi khusus :

- (a) Penyediaan formulir kesanggupan memberi sumbangan BP3 bagi orang tua murid dengan standard minimal.
  - (b) Memberi keleluasaan pada orang tua murid untuk mengangsur pembayaran BP3 dalam batas waktu tertentu.
  - (c) Melakukan dialog dengan orang tua murid
5. Dengan dihapuskannya dana SPP/DPP SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung mengantisipasi masalah ini dengan menarik dana lain yang senilai dana SPP yaitu dengan :
- (a) Menjelaskan secara terbuka kepada orang tua murid tentang berkurangnya dana untuk biaya pendidikan sebagai akibat dihapuskannya SPP/DPP.

- (b) Menginformasikan berbagai kategori kebutuhan yang biasanya dibiayai SPP/DPP.
  - (c) Mengambil kesepakatan bersama dengan orang tua murid untuk mencari jalan terbaik dalam pembayaran uang pengganti SPP.
  - (d) Memberikan laporan pertanggungjawaban secara transparan melalui BP3
6. Kegiatan Proses Belajar Mengajar pada SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung cukup besar memerlukan biaya dari jumlah biaya yang diperlukan, 64,36 % bersumber dari BP3 sedangkan sumber dari DIK, UYHD dan DBO sebesar 35,64%-nya.
7. Yang menjadi kekuatan dalam pembiayaan sekolah pada SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung adalah penyusunan RAPBS yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga kinerja sekolah akan tetap baik dalam pelayanan pendidikan serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. Kelemahan yang muncul adalah masih adanya ketergantungan dari sumber-sumber dana yang diperuntukan tambahan kesejahteraan dan peralatan sekolah. Disamping itu terdapat peluang yang baik yaitu adanya potensi dana yang bersumber dari orang tua murid yang sangat ansipratip untuk mendukung program peningkatan mutu Proses Belajar Mengajar. Peluang lain untuk mendapatkan dana adalah produk-produk keterampilan siswa yang memungkinkan untuk dijual.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa setelah adanya pencabutan SPP/DPP yang berlaku bagi semua sekolah lanjut termasuk SMKN 2 Baleendah Kab. Bandung maka Kepala Sekolah sebagai manajer sekolah berusaha mencari sumber dana lain atau mencari bentuk lain yang merupakan sumber dana bagi sekolah untuk dapat membiayai kegiatan sekolah terutama untuk kegiatan belajar mengajar dan kesejahteraan tenaga pengajar.
2. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa setelah adanya pencabutan dana SPP/DPP, jumlah dana yang konkrit menjadi berkurang, maka dilakukan efisiensi dan efektivitas yang lebih ketat dengan mengurangi beberapa kegiatan yang dianggap kurang begitu menentukan hasil proses belajar mengajar.
3. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa kurangnya dana untuk biaya proses belajar mengajar, maka partisipasi serta keikutsertaan tanggungjawab orang tua murid terhadap sekolah menjadi lebih meningkat.
4. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa penerimaan sumber dana sekolah mengalami perang surut, maka pimpinan sekolah melakukan strategi penganggaran yang tepat dan terbuka dengan lebih mengikutsertakan peran orang tua murid dalam membuat anggaran biaya.

5. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa keterlibatan orang tua murid dengan sekolah dimohon dituntut pada tingkat frekwensi yang tinggi, maka sekolah selalu menjaga kehormatan hubungan dengan orang tua murid.

### C. Rekomendasi

Disamping implikasi sebagaimana dikemukakan dimuka, maka berdasarkan kesimpulan yang ada, dapatlah dikemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Suatu kenyataan bahwa perjalanan masa yang lampau dengan selalu menggantungkan sumber dana dari pemerintah sekolah tidak menjadimandiri dan selalu nampak ketergantungannya. maka pimpinan sekolah bersama-sama guru-guru perlu berusaha mencari peluang, mencari modal untuk pencarian sumber dana sekolah, yang tentunya sekolah selaginya selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, lebih-lebih dalam pelaksanaan dengan aturan daerah.
2. Mendukung rekomendasi pertama pimpinan sekolah perlu meyakinkan kaum pimpinan daerah setempat bahwa dengan meningkatnya pendidikan di daerah, akan meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup masyarakat daerah setempat.
3. Frekwensi pertemuan dengan orang tua murid perlu ditingkatkan tidak hanya pada akhir catur wulan saja. tetapi juga pada saat yang penting, terutama yang berkenaan dengan lulusan sekolah. kualitas proses belajar mengajar, agar orang tua murid benar-benar merasa memiliki sekolah.

4. Unit produksi sekolah ditingkatkan kedudukannya semodel badan usaha sehingga perlu diorganisasi secara baik, terutama untuk pemasaran (melibatkan orang tua murid) dan menjaga standar kualitas hasil produksi.
5. Mendukung rekomendasi yang keempat yaitu untuk menjaga standard kualitas perlu mencari guru praktek yang profesional kalau perlu melibatkan para ahli yang terkenal pada bidangnya untuk menjadi guest lecture, sehingga hasil produksi para siswa benar-benar dapat dihandalkan kualitasnya.
6. Agar selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat akan hasil produksi murid, tetapi juga sekolah tidak boleh terlalu jauh sebagai kegiatan dunia usaha (menjadi berubah dari kegiatan pendidik berubah menjadi kegiatan dunia usaha) perlu dibentuk badan pengawas atau pembimbing yang melibatkan orang tua murid dan tokoh-tokoh pendidikan.



